

BIBLIOGRAPHY

- Anggraini, Melinna, Mutiara Sachputri, dan Fauzial Lubis. "Peranan Advokat sebagai Penegak Hukum." *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (2023): 751–60. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2864>.
- Antara News. "Jumlah WNI lebih data resmi, KBRI update pekerja migran di Kamboja," 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3849327/jumlah-wni-lebih-data-resmi-kbri-update-pekerja-migran-di-kamboja>.
- Antara News. "Indonesia, Cambodia to Sign MoU on Human Trafficking, Cybercrime," 2025. <https://en.antaranews.com/news/355921/indonesia-cambodia-to-sign-mou-on-human-trafficking-cybercrime>.
- Casey, Christopher A. "The Act of State Doctrine , Diplomatic Protection , and International Remedies at the Turn of the Twentieth Century Introduction : An Inconvenient Dictum," 2011, 1–31.
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat." *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 705–15. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2928>.
- Dugard, John. "Diplomatic Protection," 2025. <http://opil.ouplaw.com>.
- Fadli, Sutia, T Nazaruddin T. Nazaruddin, dan Mukhlis Mukhlis. "TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 SE-Articles (23 November 2019): 48–76. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>.
- Galih Orlando. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- International Organization for Migration. "Assessment of the Responsiveness of National Legal and Institutional Frameworks to Emerging Forms of Trafficking in Persons: Evidence from Cambodia, Indonesia, Lao PDR, and Malaysia," 2026. <https://thailand.iom.int/sites/g/files/tmzbd11371/files/documents/2026-06/assessment-of-the-responsiveness-of-national-legal-and-institutional-frameworks-to-emerging-forms-of-trafficking-in-persons.pdf>.

- KBRI Phnom Penh, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "2.277 WNI Eks Sindikat Penipuan Daring Laporkan ke KBRI Phnom Penh, Upaya Penanganan Terus Diperkuat," 2026. <https://kemlu.go.id/phnompenh/berita/2277-wni-eks-sindikat-penipuan-daring-lapor-ke-kbri-phnom-penh-upaya-penanganan-terus-diperkuat?type=publication>.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, edisi ke-17. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kasus WNI di Kamboja Meningkatkan Tajam di Awal 2025," 2025. <https://kemlu.go.id/berita/kasus-wni-di-kamboja-meningkat-tajam-di-awal-2025?type=publication>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "KBRI Phnom Penh Fasilitasi Kepulangan 3.159 WNI Eks Sindikat Penipuan Daring," 2026. <https://kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-fasilitasi-kepulangan-3159-wni-eks-sindikat-penipuan-daring?type=publication>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "KBRI Phnom Penh Tangani 841 Kasus WNI Selama Januari–Februari 2025, Mayoritas Terkait Penipuan Daring (Online Scam)," 2025. <https://www.kemlu.go.id/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan KBRI Phnom Penh. "Lebih dari 10.000 WNI Eks Jaringan Penipuan Daring Melaporkan ke KBRI Phnom Penh," 2026. <https://kemlu.go.id/phnompenh/berita/lebih-dari-10000-wni-eks-jaringan-penipuan-daring-melapor-ke-kbri-phnom-penh?type=publication>.
- Kerajaan Kamboja. "Report to the Secretary-General of the United Nations on Measures Taken in Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action," 2024. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-322-submission-cambodia-en.pdf>.
- Kompas. "Bertambah, WNI Pekerja Online Scam di Kamboja Minta Dipulangkan Kini Capai 12.019," 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/07/04/15424611>.
- Kusuma Putra, Rengga. *Hak asasi manusia*. Semarang: YAYASAN PRIMAAGUS TEKNIK, 2023.
- Marlina. "Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional." *Pandecta* 8, no. 2 (2013).

- Merentek, Yanes. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *Lex Privatum* VI, no. 9 (2018): 180–87.
- Paikah, Nur. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Watampone: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.
- Pratikno, Muhammad Wisnu. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia Perlindungan Terhadap Korban Serta Upaya Pencegahannya Di Indonesia (Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2007)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 SE-Full Articles (30 November 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14580178>.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Indonesia. "Data Penempatan dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia," 2025. WWW.BP2MI.GO.ID.
- Rachmawati, Ayu Dewi, Komang Febrinayanti Dantes, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Perlindungan Hukum. "Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia" 10, no. 3 (2022): 222–34.
- Rampen Andries, Yesaya. "RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022).
- Rema Andita, Laura, Christy Damayantira, dan Herning Suryo. "PERAN KJRI KOTA KINABALU DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA (BMI) DI SABAH." *Transformasi* I, no. 30 (2016).
- Rombot, Berliani. "TINJAUAN YURIDIS BERDIRINYA SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL." *Lex Privatum* 2, no. 2 (2023).
- Runtuwene, Jermy. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI." *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020).
- S, Lestari Wulandari, Biloka Tanggahma, dan Rivaldhy N Muhammad. "Menguak Esensi : Negara Hukum dalam Konstitusi : Sebuah Analisis Mendalam terhadap Perlindungan Hak-hak Warga Negara" 6, no. 3 (2024): 9456–68.
- Serikat Buruh Migran Indonesia. "Audiensi dengan Duta Besar RI untuk Kamboja, SBMI Bahas Isu Online Scam," 2025. <https://sbmi.or.id/audiensi-dengan->

duta-besar-ri-untuk-kamboja-sbmi-bahas-isu-online-scam/.

Syofyan, Ahmad. *HUKUM INTERNASIONAL*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusidan Perundang-undangan Universitas Lampung, 2022.

Tempo.com. "Penjelasan KBRI Tokyo soal Isu WNI Dilarang Kerja di Jepang," 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-kbri-tokyo-soal-isu-wni-dilarang-kerja-di-jepang-2015540>.

Thasya Sumolang, Morenna. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN KONVENSI WINA TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER." *Lex Et Societatis* VI, no. 5 (2018): 34–41.

Tribrata News Polri. "Kemlu Upayakan Percepatan Pemulangan Ribuan WNI Terdampak Operasi Online Scam di Kamboja," 2026. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemlu-upayakan-percepatan-pemulangan-ribuan-wni-terdampak-operasi-online-scam-di-kamboja-99119>.

Universitas Van Pretoria. "The Institution of Diplomatic Protection," 2020.

US Department of State. "Trafficking in Persons Report 2023: Indonesia," 2023. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/>.

US Department of State. "Trafficking in Persons Report 2024: Cambodia," 2024. <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.

Yunita, Masna. *BANTUAN HUKUM Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah*. Lubuk Lintah Sumatera Barat: Imam Bonjol Press, 2017.